

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 12

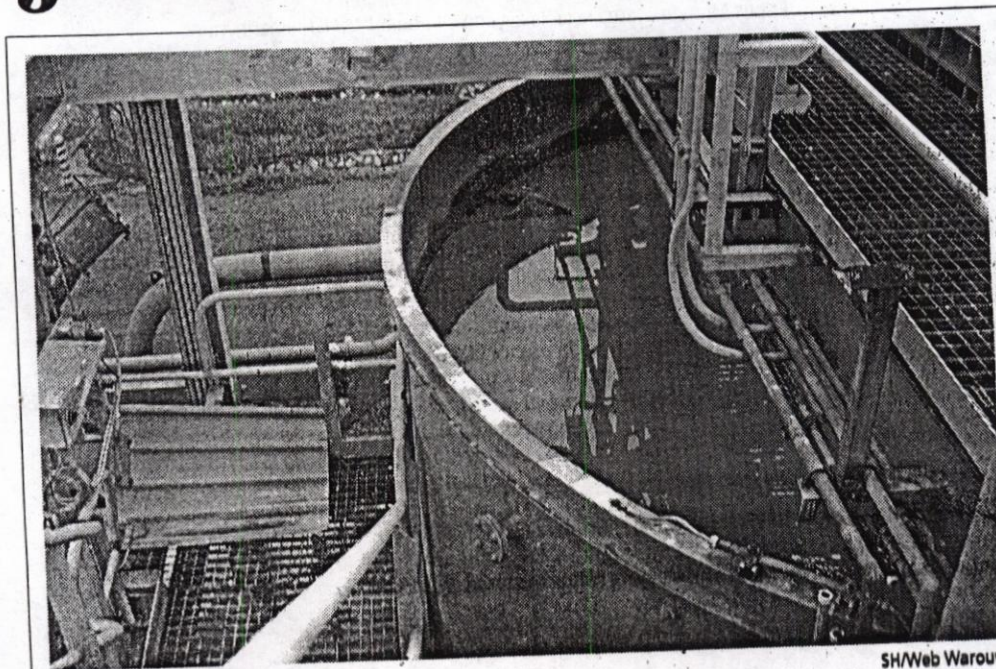
TAHUN 2004

Analisis BPPT dan KLH terhadap Teluk Buyat

Pembuangan "Tailing" Tak Dijamin Aman

Jakarta, Sinar Harapan
Pembuangan *tailing* alias *Submarine Tailing Disposal (STD)* yang dilakukan perusahaan tambang di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, tidak menjamin amannya lingkungan. Demikian studi terakhir ilmuwan yang tergabung dalam Tim Teknis.

Kasus pencemaran Teluk Buyat sampai sekarang masih belum mendapat titik terang. Tim Teknis yang dibentuk pemerintah mengumumkan bahwa pembuangan *tailing* yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang di sana justru membahayakan lingkungan. "STD ini akan aman apabila di daerah tersebut ada termoklin, yakni suhu atau temperatur tertentu yang membuat limbah tidak akan naik ke permukaan. Namun studi terakhir yang dilakukan oleh ilmuwan kami dengan kapal Baruna Jaya belum lama ini membuktikan bahwa tidak ada daerah termoklin di sana," ujar Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Ir. Hatta Radjasa kepada pers di Jakarta, Senin (6/9).



BAK PENAMPUNGAN - Bak penampungan limbah Mercury, Sianida dan Arsen di PT. Newmont Minahasa Raya.

Pemerintah membentuk tim khusus yang melibatkan dua kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang ada di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) bekerja sama dalam Peer Review Team. Keduanya mengkaji kembali dampak lingkungan industri pertambangan di Teluk Buyat, Sulawesi Utara (Sulut) yang selama ini dituduh sebagai pemicu penderitaan masyarakat sekitar. "Penelitian tersebut menggunakan metodologi yang baku,

baik dalam pengambilan dan analisis sampel dengan memakai laboratorium yang telah terakreditasi," demikian menurut Drs. Rasio Sani, Asisten Deputi Urusan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup kepada pers di Jakarta belum lama ini. Di samping penelitian terhadap kualitas lingkungan di Teluk Buyat dan sekitarnya, Tim Teknis juga melakukan penelitian terhadap jalur masuknya logam berat ke tubuh penduduk desa Buyat Pantai, desa Buyat dan desa Ratatotok.

Apabila diketahui secara pasti adanya pencemaran perairan di Teluk Buyat dan sekitarnya berdasar studi, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pihak yang melakukan pencemaran sesuai dengan UU No. 23 tahun 1997. Tim Teknis ini memang tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung, namun mengkaji studi-studi yang ada. Tim ini beranggotakan 16 orang ahli. Jumlah studi yang dikaji sebanyak 12 studi yang dilakukan dalam kurun waktu 1994-2004. Studi tersebut dilakukan oleh berbagai pihak, mulai lembaga swadaya masyarakat (LSM), Departemen Kesehatan

Sudah Dilarang

Sementara Tim Teknis yang dibentuk kali ini bukan semata terdiri atas ilmuwan BPPT dan KLH saja. Ada pula sejumlah peneliti independen dari LSM dan perguruan tinggi setempat. Sebut saja nama seperti Dr. Rignolda Jamaluddin, ahli ekosistem laut dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) serta Chalid Muhammad dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Lebih jauh mengenai STD, Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup yang kini menjadi pemerhati masalah lingkungan juga menanggapi bahwa sebenarnya STD sudah lama dilarang di Amerika Serikat. Ini disebabkan *tailing* atau limbah penambangan yang dibuang ke laut tidak akan dijamin bisa aman bagi lingkungan sekitar.

Sebagian besar perusahaan tambang di Indonesia termasuk di Teluk Buyat menggunakan metode STD ini dalam membuang limbahnya. Jika diterjemahkan bebas menjadi pembuangan *tailing* bawah laut. Istilah STD kurang disukai oleh perusahaan pertambangan karena ada kata disposal yang berarti pembuangan. Mereka lebih suka menggunakan sebutan Submarine Tailing Placement (STP), karena

terdapat kata *placement* berarti penempatan. STP bermakna seakan-akan perusahaan tidak membuang *tailing* ke laut akan tetapi menempatkannya di laut. Selain istilah STD dan STP masih terdapat istilah lain, yaitu DSTP (Deep Sea Tailings Placement) atau penempatan *tailing* di laut dalam. Istilah itu pun dipopulerkan oleh perusahaan pertambangan. Terlepas dari politik penggunaan bahasa, ketiga istilah tersebut pada prinsipnya sama, yaitu membuang *tailing* di laut.

Menurut JATAM, PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang beroperasi di Teluk Buyat merupakan perusahaan yang pertama kali menggunakan metode STD di Indonesia. Kemudian diikuti oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Sumba-Nusa Tenggara Barat. Saham mayoritas kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh Newmont Corporation satu sindikat tambang emas terbesar kedua di dunia, yang berkantor pusat di Denver, Amerika Serikat.

Dalam asumsi dasar, *tailing* yang dibuang ke laut berbentuk lumpur kental yang mengandung 45 - 55 persen padatan. Berat jenis ini lebih besar dari densitas air laut, kurang lebih 1,336 kilogram per meter. Oleh karenanya *tailing* akan mengalir sepanjang kurang lebih 1,028 kilogram per meter dasar laut.

(SH/merry magdalena)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2004

Jerry Konjamso Susul David Jadi Tersangka Kasus Buyat

JAKARTA (Suara Karya): Kepala Bagian Lingkungan Hidup PT Newmont Minahasa Raya (NMR), Jerry Konjamso, ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus pencemaran lingkungan hidup di Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Sulut), yang diduga dilakukan PT NMR.

Menurut Direktur V Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigjen Pol Suharto, kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (8/9), Jerry adalah orang yang bertanggung jawab dalam urusan limbah setelah David Sompie.

Suharto menambahkan, selain Sompie dan Jerry, rencananya penyidik Bareskrim Polri juga akan memeriksa Iza Karmisa selaku saksi dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). Iza, menurut Suharto adalah orang yang menggantikan Musnaryanti, pejabat KLH pada saat Sony Keraf menjabat sebagai Meneg LH.

"Kita ingin mengetahui apakah setelah Sony Keraf mengeluarkan surat No 1456/2001 tentang ketentuan kadar logam tertentu tidak melebihi parameter, dan perintah Sony kepada PT NMR untuk mengadakan *Ecological Risk Assesment* (ERA) selama 6 bulan yang dilakukan PT NMR beserta lembaga terkait dilakukan atau tidak," kata Suharto.

Dengan ditetapkannya Jerry sebagai tersangka, berarti Mabes Polri telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus Buyat. Tersangka sebelumnya adalah Manajer External Relation PT NMR David Sompie. Jerry dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pertama di Mabes Polri pada Jumat (10/9) mendatang.

Humas PT NMR, Kasan Mulyono, ketika dikonfirmasi per telepon, membenarkan adanya penetapan tersangka terhadap Jerry. Ia juga mengatakan bahwa surat panggilan untuk Jerry sudah mereka terima Selasa kemarin. "Nanti akan didampingi Pak Palmer (kuasa hukum PT NMR)," kata Kasan.

Menurut Kasan, pihaknya menghormati hukum karena itu Jerry akan memenuhi panggilan Polri. "Dengan begitu kita bisa menjelaskan apa adanya," kata Kasan.

Ia menambahkan, sebagaimana yang dikatakan dalam Siaran Persnya, PT NMR percaya karyawannya akan dibebaskan dari segala tuduhan. "Jerry adalah seorang karyawan yang berkualifikasi dan berdedikasi tinggi. Jerry telah membantu melaksanakan pengelolaan lingkungan perusahaan kami dengan sangat baik," kata Kasan.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Paiman mengatakan, penyidik Bareskrim Polri, hanya memberikan izin duka terhadap tersangka kasus Buyat, David Sompie, yang menjabat sebagai Manajer External Relation PT NMR selama 1 minggu dari 3 minggu yang diajukan kuasa hukumnya.

"Penyidik hanya memberikan toleransi waktu kepada David Sompie selama 1 minggu sebagai masa berduka atas meninggalnya ibu mertuanya," katanya.

Izin duka itu, menurut Paiman, sudah cukup bagi Sompie dan diharapkan ia memenuhi panggilan penyidik Bareskrim yang akan memeriksanya. "Dengan izin itu, kita harapkan dia akan memenuhi panggilan penyidik," kata Paiman. (J-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2004

■ Pencemaran Teluk Buyat

DESDM Minta Semua Pihak Tunggu Hasil Penelitian Tim Teknis dan Terpadu

Jakarta, NERACA

Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen GSDM DESDM) Simon Sembiring meminta semua pihak menunggu hasil penelitian Tim Teknis dan Tim Terpadu yang sedang melakukan penelitian komprehensif di lapangan terkait dengan kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan PT Newmont Minahasa Raya (NMR).

"Hasil penelitian tim itu dan pembuktian di pengadilan akan menjadi acuan Ditjen GSDM untuk tentukan langkah lebih lanjut dalam penyelesaian kasus ini," kata Simon, di Jakarta, kemarin.

Ia sendiri berharap semua pihak dapat bekerjasama dalam mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya pada subsektor pertambangan umum, sehingga pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro menilai, hasil kajian yang disampaikan tim Peer Review soal Buyat hanya masukan bagi tim gabungan. Menurut menteri, hasil rapat koordinasi (rakor)

Polkam dan Kesra beberapa waktu lalu telah memutuskan untuk membentuk tim gabungan.

Tim gabungan yang *vocal point*-nya menteri lingkungan hidup itu terdiri dari beberapa instansi. Tim gabungan itu, terdiri dari tim pengarah dan tim teknis. Sedangkan *peer review* adalah para pakar yang mengkaji dan *me-review* berbagai studi yang hasilnya dijadikan masukan kepada tim teknis. Kemudian tim teknis bersama-sama dengan *steering comit-tee* akan membuat kesimpulan akhir. Kita tunggu saja hasil kesimpulan tim ini."

Simon sendiri menyatakan penyesalannya atas diumumkannya kesimpulan hasil kerja Tim Peer Review. Sebab tegas dia, penguaman itu bisa menimbulkan opini yang keliru bagi masyarakat terhadap kasus yang saat ini sedang diteliti secara intensif di lapangan oleh Tim Teknis lintas instansi.

Ia juga mempertanyakan kapabilitas dari anggota Tim Peer karena sebelumnya keanggotaan tim tersebut disepakati berasal dari kalangan ilmuwan dari perguruan tinggi dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu terkait. "Sebab, ada anggota Tim yang bukan ilmuwan, dinyatakan sebagai ahli

pertambangan sementara yang bersangkutan diketahui tak berlatar pendidikan pertambangan.

Dalam kesempatan itu ia juga menilai, rekomendasi Tim Peer Review Kantor Menteri Lingkungan Hidup agar mengamandemen dokumen Rencana Penutupan Tambang yang mewajibkan NMR lakukan pemantauan lingkungan selama 30 tahun kurang tepat sebab, tanggungjawab NMR seharusnya berpatokan pada pulihnya fungsi lingkungan yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan bukan berpatokan pada waktu.

Menurut Simon, dalam dokumen rencana penutupan tambang NMR ditugaskan untuk menyelesaikan pemulihan fungsi lingkungan, minimum tiga tahun. Sebab artinya dalam kurun waktu itu fungsi lingkungan belum pulih atau menunjukkan kecenderungan belum menuju pemulihan, maka waktu pengelolaan dan pemantauan akan diperpanjang. "Rekomendasi itu juga berarti selama 30 tahun tak boleh ada aktifitas apapun kecuali hanya memantau. Selama kurun waktu itu, daerah yang dinyatakan tercemar menjadi daerah yang tidak bermanfaat," kata Simon. (31)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input checked="" type="radio"/> PAB																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGST</th><th>SEPT</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 6	TAHUN 2004																																											

NILAI PENJUALAN ANTAM MENINGKAT 25%

Jakarta, 8 September (PAB)

Nilai penjualan PT Aneka Tambang Tbk meningkat sebesar 25% menjadi Rp. 2,139 triliun atau naik 33 % dalam dolar Amerika. Peningkatan ini disebabkan kenaikan harga jual emas dan nikel. Harga jual rata-rata emas naik 17% seiring dengan meningkatnya penggunaan emas sebagai *safe haven* investasi akibat isu keamanan dunia, demikian data diperoleh PAB dari Humas Antam di Jakarta, Selasa (7/9)

Sementara harga jual rata-rata feronikel, bijih nikel saprolit dan bijih nikel limonit naik masing-masing 33%, 29%, dan 82%. Harga jual limonit mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan penjualan LGSO. 85% dari hasil penjualan Antam adalah ekspor, dan lebih 99% dari pendapatan perusahaan berdenominasi dolar Amerika.

Pelanggan-pelanggan terbesar Antam pada tahun 2003 berdasarkan nilai transaksi adalah produsen baja nirkarat Eropa, antara lain Thyssen Krupp Nirosta, ALZ BV dan Avesta Polarit, dengan total keseluruhan pembelian feronikel sebesar Rp. 351 Miliar. Konsumen feronikel lainnya adalah Misubishi Corp, Pohang Steel Corp, dan Mitsui & Co, dengan pembelian masing-masing Rp. 322 miliar, Rp. 205 miliar, dan Rp. 188 miliar.

Sedangkan volume penjualan feronikel naik 8% dibandingkan tahun 2002 menjadi 8.868 ton Ni (nikel) akibat kenaikan volume produksi menjadi 8.933 ton Ni, termasuk 597 ton Ni yang diproduksi melalui *full smelting* dengan Panco. Produksi feronikel Antam pada tahun 2003 mencapai 89% dari target produksi 10.000 ton Ni. Tidak tercapainya produksi feronikel dari target disebabkan tidak stabilnya suplai tenaga listrik serta adanya kebutuhan *overhaul* atas pabrik FeNi II, yang sering kali mengalami panas berlebihan (*overheating*).

Perusahaan juga melakukan perbaikan pada pabrik FeNi (feronikel) I selama 8 hari pada bulan Januari 2003. Antam juga telah melakukan *overhaul* pada pabrik FeNi I pada Tahun 1998/1999. sepanjang tahun 2003, *load factor* rata-rata dari dua unit pembangkit listrik di Pomala berkisar antara 75% sampai 85% dari kapasitas normal.

Untuk menjamin pasokan tenaga listrik yang stabil, pada bulan Juli 2003 Antam menyewa generator listrik sebesar maksimal 6 MW dengan GE Energy Rentals selama 33 bulan. Pada awalnya Antam berencana untuk mengoperasikan pabrik FeNi III dan pembangkit listrik ketiga yang baru pada tahun 2003. namun seiring dengan kesulitan pendanaan, pembangunan pabrik FeNi III maupun pembangkit listrik belum terselesaikan pada tahun 2003.

Perseroan ini juga merencanakan melakukan *overhaul* pada pabrik FeNi II menyusul kedatangan suku cadang impor pada semester kedua tahun 2004. Selain itu, Antam akan melakukan modernisasi pada pabrik FeNi II melalui penerapan teknologi *Hatch* dan *cooper cooler* lebih efisien yang akan digunakan di pabrik FeNi III. Meskipun demikian, nilai penjualan feronikel meningkat 55% menjadi Rp 791 miliar. (PAB/fit/R-07)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Penanggulangan Beban Pajak Ganggu Kinerja PT Timah

JAKARTA (Media): PT Timah Tbk terancam menanggung beban pajak yang ditanggungkan sejak 1998 karena DPR hingga kini belum menyetujui rencana penerbitan saham kedua (*secondary offering*) sebesar 14%.

"Tanpa *secondary offering*, perusahaan akan dibebani pajak akibat pengalihan aset dari perusahaan induk kepada anak-anak perusahaan," kata oleh Direktur Utama (Dirut) PT Timah, Thobrani Alwi, di Jakarta, kemarin.

Thobrani mengungkapkan bahwa pada divestasi perusahaan pada 1998, perusahaan tidak akan dikenai nilai pasar dalam melakukan pengalihan aset. Namun, hanya akan dikenai nilai buku, dengan syarat perusahaan harus melakukan penawaran saham kedua tersebut.

Menurut Thobrani, Menteri Keuangan (Menkeu) telah menyetujui penawaran saham kedua tersebut dan hingga kini pi-

haknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari anggota Dewan.

Walaupun menolak mengungkapkan berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan tunai kepada pemerintah tersebut, tetapi Thobrani mengatakan bahwa jumlahnya akan sangat memberatkan kinerja perusahaan.

"Untuk itu, kami meminta dukungan dari Komisi VIII dan IX DPR agar dapat secepatnya melakukan investasi sehingga ada pengurangan pajak."

Terkait rencana investasi, Thobrani mengungkapkan pihaknya hingga kini sedang melakukan uji tuntas terhadap dua lokasi baru tambang batu bara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dengan dana investasi antara US\$10 juta hingga US\$20 juta.

Kerugian CMNP
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Dirut PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Daddy Hariadi menga-

takan pihaknya akan besaran penyertaan pada Citra Metro Manila Tollways Corporation (CM-MTC), anak perusahaan yang beroperasi di Manila, karena mengalami kerugian akibat depresi ekonomi di negara tersebut.

"Kami akan mengurangi penyertaan, dari sebesar 21% menjadi kurang dari 20% untuk menghindari agar kerugian tidak masuk dalam neraca keuangan perusahaan," ujar Daddy kemarin.

Daddy mengatakan, nilai kerugian akibat depresi ekonomi di Manila sudah melebihi besarnya investasi. Tetapi, karena perusahaan menggunakan metode ekuitas dalam investasi, maka kerugian tersebut tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan.

CMNP juga sedang menunggu keputusan pemerintah terkait tagihan *negotiable certificate deposit* (NCD) sebesar US\$28 juta pada Bank Unibank yang telah dilikuidasi. (AD/E-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2004

Pemerintah Harus Hati-hati Buat Kontrak Karya

JAKARTA— Belajar dari kasus Teluk Buyat, pemerintah diminta berhati-hati menerima masuknya investasi pertambangan. Pemerintah tidak hanya harus membuat Kontrak Karya (KK) yang ketat dan adil. Tapi juga, tidak lagi memberikan *privelege* (hak khusus) bagi para investor pertambangan.

Demikian diungkapkan Ketua Bidang Industri Energi dan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia, Herman Afif, di Jakarta, Rabu (8/9). "*Privelege* tidak memberikan iklim investasi lebih baik. Malah, sebaliknya," kata Herman.

Begitu juga dengan KK.

Herman menjelaskan KK harus berisi secara rinci tentang kegiatan pertambangan dari sebelum, semasa produksi, hingga pascapertambangan. Salah satu yang terpenting, kata dia, adalah persoalan lingkungan, baik sebelum maupun sesudah penambangan.

Menurutnya, ketentuan adanya dana untuk penutupan dan pascapenambangan tidaklah cukup. "Harus ada kewajiban dari pemerintah kepada perusahaan pertambangan agar menyiapkan semacam *trust fund*," tegasnya.

Dana tersebut diperlukan guna menghadapi segala hal yang mungkin dan bisa ter-

jadi di masa rehabilitasi. Kasus Teluk Buyat, kata Herman, menjadi contoh yang sangat baik. Dalam hal ini, PT Newmont Minahasa Raya (NMR), jelasnya, hanya menyiapkan dana untuk rehabilitasi yang jumlahnya tidak terlalu besar (2,5 juta dolar AS untuk tiga tahun).

Sementara, sambungnya, mereka tidak memikirkan segala hal yang akan terjadi pada masa rehabilitasi itu. Dia menyebut persoalan kesehatan warga Teluk Buyat sebagai contoh masuk akal. "Ini bukan soal *blunder* mengakui telah terjadi pencemaran atau tidak. Tapi ini masalah kemanusiaan," tandasnya. ■ erd

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 25

TAHUN 2004

Walau Harga Tinggi, PT Timah Tidak Menggenjot Produksi

JAKARTA, KOMPAS — Sekalipun harga timah dunia terus naik, PT Timah tidak menggenjot produksi dan tidak melakukan penjualan besar-besaran. Industri pertambangan harus mempertimbangkan perjalanan industri untuk jangka panjang, bukan mengejar keuntungan sesaat saja.

"Tidak mentang-mentang harga timah sedang tinggi terus kami jual besar-besaran. Bukan begitu cara bisnis pertambangan," kata Direktur Utama PT Timah, Thobrani Alwi di Jakarta, Rabu (8/9).

Dijelaskan, tambang timah ada di berbagai lokasi yang berbeda-beda tingkat kesulitan penambangannya. Ada yang tersedia di darat sehingga mudah

ditambang dan sangat murah biayanya, ada yang di laut dangkal sehingga lebih sulit dan perlu biaya penambangan lebih tinggi, ada juga di laut yang lebih dalam yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dan lebih mahal biaya penambangannya. Penambangan timah di lokasi dengan tingkat kesulitan tinggi hanya ekonomis jika harga timah tinggi sehingga tingkat keuntungannya memadai.

"Jadi, saat harga sedang tinggi, kami sengaja ambil timah di tempat yang tingkat kesulitannya tinggi, sekalipun dengan demikian produksi kami tidak setinggi sebelumnya. Karena saat harga rendah, lokasi itu tidak ekonomis lagi untuk ditambang. Jadi, kami tidak ha-

nya mempertimbangkan keuntungan saat ini, tetapi kelangsungan bisnis jangka panjang," katanya.

Pada semester pertama lalu, harga rata-rata timah dunia mencapai 8.050 dollar AS per ton. Pada akhir tahun 2004, rata-rata harga timah dunia diperkirakan antara 8.000-8.500 dollar AS per ton.

Semester pertama tahun 2004 ini, PT Timah membukukan laba bersih Rp 82,9 miliar, naik 96 persen lebih dari laba bersih semester pertama tahun 2003 senilai Rp 42,2 miliar.

Terus meningkatnya harga timah dunia ini terjadi seiring dengan peningkatan konsumsi timah. Pada tahun 2004, konsumsi timah diperkirakan tum-

buh sekitar enam persen menjadi 318,8 ribu ton. Padahal, stok dunia saat ini hanya mencapai 240.000 ton per tahun atau 4.000-5.000 ton per minggu. Adapun stok yang stabil berada di kisaran 10.000-15.000 ton per minggu.

Kurangnya pasokan timah dunia karena China sebagai produsen timah terbesar mengurangi produksinya, tinggal 50.000 ton, atau separuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu pun sebagian besar diserap pasar China sendiri. Setelah China, Indonesia merupakan penghasil timah terbesar kedua, disusul Peru. Tiga negara yang diwakili 5 produsen timah ini menguasai 65-75 persen pasar timah dunia. (ANV)

45

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

Timah Akan Akuisisi Tiga Perusahaan Batubara

JAKARTA - PT Tambang Timah Tbk telah menandatangani kontrak jual-beli untuk menjual 300.000 ton batubara ke perusahaan Jepang, Mitsubishi Corp, tahun 2005. Demikian disampaikan Direktur Utama PT Tambang Timah, Thobrani Alwi di Jakarta, Rabu (8/9). "Kami telah menandatangani kesepakatan itu dua hari lalu," kata dia. Ia mengungkapkan kontrak awal tersebut tidak menyebutkan berapa harga penjualannya.

Seperti diketahui, Timah belakangan ini sedang mencoba melakukan diversifikasi bisnis untuk mengurangi ketergantungannya terhadap timah yang ketersediaannya di dalam negeri semakin berkurang.

Selain itu, masih berkaitan dengan diversifikasi ke bisnis batubara, Thobrani juga mengungkapkan bahwa Timah merencanakan akan mengakuisisi tiga perusahaan tambang batubara di Kalimantan pada akhir tahun ini. Ia mengatakan, Timah telah menyediakan dana sedikitnya US\$ 20 juta untuk membiayai akuisisi tersebut. (dan)

46

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3 11

TAHUN 2004

Target akuisisi PTBA mundur dari Agustus

JAKARTA (Bisnis): Target PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) Tbk yang akan mengakuisisi satu perusahaan tambang meleset dari jadwal semula Agustus, karena masih alotnya negosiasi dengan penjual.

"Rencana akuisisi ini tadinya ditargetkan rampung Agustus. Tapi karena negosiasi berjalan agak alot, rencana itu belum terealisasi hingga kini," kata Dirut PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Ario Wibisono, penasehat keuangan PTBA dalam rencana akuisisi tersebut, kepada *Bisnis* kemarin.

Dia menolak menyebutkan perusahaan yang akan diakuisisi oleh PTBA, lokasi tambang, maupun harga akuisisinya, karena terikat perjanjian kerahasiaan dengan manajemen PTBA.

Sekretaris Perusahaan PTBA Milawarma pada kesempatan terpisah juga menyatakan hal serupa.

Proses akuisisi tersebut, dia melanjutkan, masih dalam tahap negosiasi dan tengah meminta persetujuan dari dewan komisaris.

Dia mengakui perseroan itu telah melakukan uji tuntas terhadap perusahaan yang akan diakuisisi.

Namun hasilnya belum dapat diumumkan karena terkait soal penentuan harga penawaran.

"Kalau kami *disclose* nanti harganya berubah," kata Milawarma.

Opsi pendanaan

Menyinggung pendanaan untuk akuisisi perusahaan tambang itu, Milawarma menambahkan perseroan tersebut mempersiapkan tiga opsi seperti pembiayaan dari dana internal, eksternal, atau kombinasi dari keduanya.

"Ada beberapa alternatif pendanaan yang kami miliki dalam mengakuisisi perusahaan tambang itu. Namun kepastiannya nanti akan diumumkan setelah negosiasi selesai," jelas dia.

Menyinggung kemampuan dana internal saat ini, dia melanjutkan, PTBA memiliki dana kas sebesar Rp625 miliar," kata dia.

Menurut data *Bisnis*, BUMN itu merencanakan mengakuisisi lima perusahaan tambang yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Akuisisi tersebut dimaksudkan untuk menambah produksi batu bara perseroan itu sekitar satu sampai dua juta ton per tahun.

Setelah tim akuisisi BUMN pertambangan tersebut mengevaluasi lima perusahaan tambang, saat ini muncul satu perusahaan yang dianggap lolos pada tahap awal.

Perseroan berharap dengan mengakuisisi perusahaan tersebut, tambang di Kalimantan itu, PTBA dapat mengatasi pasokan batu bara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya.

Saat ini satu perusahaan tersebut sudah masuk dalam proses penawaran awal yang tidak mengikat.

Menyinggung rencana pembangunan PLTU Banjarsari, Sumatra Selatan, menurut dia, saat ini dalam proses tender dengan PLN.

"Pembangunannya dilakukan kalau proses tender telah dilakukan."

Untuk pembangunan PLTU senilai US\$203 juta ini, perseroan telah menjajaki pembiayaan berupa kredit dari sejumlah bank.

"Dari proyek PLTU Banjarsari senilai US\$203 juta, sebesar 60% pembiayaannya atau sekitar US\$140 juta akan diperoleh melalui pinjaman. Sedangkan sisanya 30% akan dibiayai melalui pendanaan internal konsorsium," kata Milawarma, (*Bisnis*, 9 Juli). (adn)

47

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2004

Tersangka kasus Teluk Buyat bertambah

JAKARTA (Bisnis): Manajer lingkungan PT Newmont Minahasa Raya (NMR) Jerry ditetapkan menjadi tersangka kasus pencemaran Teluk Buyat, menyusul rekannya David Sompie yang mulai diperiksa pekan depan.

"Jerry itu menjabat sebagai manajer lingkungan PT Newmont Minahasa Raya. Rencananya Jumat pekan ini mulai diperiksa penyidik berkaitan adanya pencemaran di Teluk Buyat," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Paiman kemarin.

Menurut dia, penyidik ingin mengembangkan pemeriksaan, apakah pola pembuangan limbah PT NMR itu yang mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan di Teluk Buyat merupakan tanggung jawab Jerry dan David Sompie atau kebijakan perusahaan. (et)

48

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : B1	

TAHUN 2004

Timah desak DPR bahas divestasi

JAKARTA (Bisnis): PT Timah Tbk meminta dukungan Komisi V, VIII dan IX agar divestasi 14% saham pemerintah segera direalisasikan sehingga BUMN itu tidak perlu membayar pajak yang timbul akibat restrukturisasi anak perusahaan.

Dirut Timah Thobrani Alwi menegaskan pihaknya hanya akan mengandalkan pelaksanaan divestasi sebagai persyaratan untuk tidak membayar pajak akibat selisih revaluasi aset.

Selain itu, sambung dia, perseroan juga tidak mempunyai dana untuk membayar pajak yang timbul dari restrukturisasi anak usaha.

"Kami telah minta dukungan komisi V, VIII, dan IX untuk segera melaksanakan divestasi Timah. Kalau divestasi jadi dilaksanakan, kami tidak punya kewajiban lagi untuk membayar pajak tersebut. Lagipula kami tidak ada kemampuan untuk membayar itu, artinya perusahaan tidak usah dikenakan pajak," ujarnya dalam paparan publik kemarin.

Pajak yang timbul akibat restrukturisasi anak usaha itu, jelas Thobrani, hingga kini belum diketahui nilai pastinya karena hal itu merupakan selisih antara nilai buku dan nilai pasar.

"Soal berapa besaran pajak itu, kami sendiri tidak tahu karena itu harus dinilai ulang lagi. Yang dipajakin itu kan selisih antara nilai buku dan nilai pasar atas aset yang ditransfer ke anak perusahaan."

Direktur Keuangan Timah Wachid Usman yang juga hadir dalam acara tersebut optimistis divestasi saham pemerintah tahap kedua di Timah akan direalisasikan meskipun telah tertunda sejak beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, dia juga yakin ditjen pajak tidak akan mempertanyakan masalah pajak tersebut kendati divestasi tidak direalisasikan tahun ini.

"Menteri Keuangan telah mengetahui kondisi ini. Dan menteri BUMN telah melaporkan rencana divestasi kami kepada DPR, jadi kami yakin divestasi itu akan dilakukan," ujar Wachid.

Seperti diketahui, berdasarkan surat No. S-450/PJ.42/1998 pada 9 September 1998, dirjen pajak telah menyetujui penggunaan nilai buku atas pengalihan harta sehubungan dengan restrukturisasi usaha perseroan.

Surat itu mengatur beberapa ketentuan termasuk keharusan bagi perseroan untuk melaksanakan *secondary offering* atas saham yang dimiliki pemerintah selambat-lambatnya 9 September 1999.

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan perseroan belum melaksanakan *secondary offering*, maka nilai pengalihan harta yang sebelumnya berdasarkan nilai buku itu akan dihitung kembali berdasarkan nilai pasar yang mungkin menimbulkan kewajiban perpajakan.

Terkait hal itu, Timah telah mendapatkan persetujuan penundaan *secondary offering* sebanyak tiga kali, terakhir berdasarkan surat dirjen pajak No. S-286/PJ.42/2002 tanggal 4 Juli 2002 yang memberikan penundaan hingga 9 September 2002.

Di sisi lain Thobrani memperkirakan volume penjualan perseroan tahun ini kemungkinan besar akan turun dibandingkan 2003 karena perseroan fokus pada produksi darat yang mendapatkan persaingan keras dari para pedagang timah antar pulau.

Namun, lanjut dia, perseroan dipastikan dapat memenuhi komitmen kepada para pelanggan sebesar 32.000 ton.

Pada 2003, perseroan membukukan volume penjualan sebesar 45.373 ton. Penjualan timah perseroan sepanjang semester I/2004 juga turun menjadi 15.520 ton dari 21.861 ton pada semester I/2003. Namun dia belum dapat memberikan perkiraan volume penjualan untuk tahun depan. (08)